djp

Edisi Oktober 2021

E-MIGAZINE

PAJAK UNTUK MEMBANGUN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Iwan Djuniardi,

VISIONER YANG SETIA PADA PROSES

Daftar Isi

E-MIGAZINE
Edisi Oktober 2021

Sekapur Sirih
PAJAK MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE ... 3

Editorial
TULANG PUNGGUNG ITU BERNAMA PAJAK ... 6

Aksi KPP Migas
FOCUS GROUP DISCUSSION, MENITI JALAN MENUJU TRANSPARANSI ... 9

Serba-serbi Migas
SEJARAH LAHIRNYA KPP MIGAS ... 17

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Tim Emigazine:
Fungsional Penyuluh Pajak KPP Migas

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

Pencapaian KPP Migas
MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PPH MIGAS MELALUI ANALISIS FQR ... 11

Karakteristik Industri Migas
MEMAHAMI PROSES PENETAPAN WILAYAH KERJA MIGAS ... 14

Reportase
ENERGI TERBARUKAN, SEBUAH CATATAN PERJALANAN ... 19

Tokoh Inspiratif
Iwan Djuniardi, VISIONER YANG SETIA PADA PROSES ... 24

"Jangan pernah pamrih dan setialah pada proses," ujarnya. "Kalian jangan *seeing then believing*, tapi harus *believing then seeing*.

Olahraga dan Hobi
BADMINTON, OLAHRAGA ALTERNATIF SAAT PANDEMI ... 29

Wisata
BNR, ONE STOP TRAVELLING DI BOGOR ... 32

Kuliner
SINGGAH DI WARUNG PESINGGAHAN BALI ... 36

Resensi Film
IMPERFECT, SEBUAH PERJALANAN UNTUK MENERIMA DIRI SENDIRI ... 38

Pajak Membangun *Good Governance*

“Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya, dan disegani maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat.”

Yang saya sampaikan di atas adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengenai peran vital perpajakan. Dalam konteks bernegara, peran perpajakan sesuai konstitusi di negara kita, dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pajak sebagai penopang utama APBN dan alat Kebijakan Fiskal (Insentif). Peran kedua adalah pajak sebagai penopang utama Good Governance.

Sebagai penopang utama APBN dan alat Kebijakan Fiskal, peran pajak bisa kita jabarkan lagi, yang pertama adalah pajak sebagai fungsi budgetair. Dalam jangka pendek, peran pajak di sini sangat jelas bisa kita pahami. Karena pajak sebagai pengisi kas negara, mengisi APBN, dan kemudian dibelanjakan. Jadi di sini pajak berperan untuk keperluan negara. Bukan hanya untuk keperluan pemerintah. Kalau kita bicara negara, berarti ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Dan pajak berperan untuk ketiga-tiganya.

Yang kedua, dalam konteks penopang APBN, pajak mempunyai peran sebagai pendorong pembangunan melalui fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Dalam fungsi distribusi, pajak berperan meredistribusi dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan keuangan tinggi kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan minimal. Sebagai fungsi alokasi, pemerintah melalui APBN melakukan alokasi Dana Alokasi Umum, Dana Desa, Bantuas Sosial, Sumbangan Sembako, BLT dan sebagainya.

Sedangkan fungsi stabilisasi, misalnya adanya insentif perpajakan yang dibuat agar ekonomi tetap stabil. Belum lama ini ada insentif berupa PPnBM atas mobil Ditanggung Pemerintah. Tujuannya agar industri otomotif tetap tumbuh. Termasuk PPN Impor untuk kegiatan industri hulu migas juga dibebaskan. Juga ada insentif PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, dan beberapa insentif lainnya,

merupakan fasilitas dari pemerintah lewat pajak untuk mendorong stabilisasi ekonomi.

Masih dalam konteks pajak sebagai penopang APBN, peran ketiga yakni pungutan pajak sekaligus sebagai alat negara yang berfungsi untuk mengelola dan mengontrol perekomomian. Yang dipungut pajak adalah transaksi ekonomi. Kalau ingin memungut pajak dengan benar dan adil, maka pemerintah harus mampu mengawasi transaksi ekonomi secara komprehensif.

Peran pajak tersebut di atas sangat sering kita dengar dan sangat kita pahami. Peran pajak selanjutnya yang sangat penting dan tidak kalah dengan peran di atas adalah pajak berperan sebagai penopang utama *Good (Corporate) Governance*. Peran tersebut ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di balik pelaksanaan pemungutan pajak sesungguhnya merupakan cara negara untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan atau warga negara (Wajib Pajak). Adanya kewajiban wajib pajak melaporkan SPT, membuat laporan keuangan, membuat pembukuan atau pencatatan, melaporkan semua penghasilan dan beban-bebannya, memotong dan me-mungut pajak, melaporkan harta dan utang, merupakan bukti bahwa sesungguhnya pajak tidak dapat dipisahkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar utama *Good Governance*. Artinya pemungutan pajak yang adil dan berkepastian hukum akan terwujud jika semua Wajib Pajak berperilaku transparan dan akuntabel atas seluruh aktivitas usaha dan ekonominya.

Selanjutnya, masih dalam konteks penopang *Good Governance*, pungutan pajak juga sekaligus memiliki fungsi untuk mendorong ketertiban transaksi keuangan dan transaksi ekonomi, sehingga dapat mencegah malpraktik transaksi ekonomi dan keuangan lainnya.

Dengan demikian, dibalik penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak terkandung makna bahwa setiap Wajib Pajak harus transparan dan akuntabel dalam mencatat dan membukukan transaksinya. Hal ini secara otomatis akan membangun pelaku usaha dan aktivitas ekonomi serta keuangan menjadi *Good Governance* yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa melalui konstitusi. Untuk itu, peran pajak sesungguhnya bukan sekedar sebagai pengisi kas negara, namun juga memiliki peran luhur yaitu mendorong dan membangun *Good Governance*.

Sebagai penutup, perlu saya sampaikan bahwa tanggal 30 Oktober ini, kita memperingati Hari Oeang yang ke-75. Karena pada hari ini tujuh puluh lima tahun silam mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Sejatinya, uang kita itu bukanlah semata sebagai alat pembayaran, tetapi juga memiliki makna yang hakiki yakni berfungsi sebagai lambang kemandirian ekonomi bangsa sama halnya dengan Pajak.

Oleh karena itu, kemandirian ekonomi suatu bangsa akan terwujud jika seluruh masyarakatnya sadar, tertib dan patuh dalam membayar pajak. Mari satukan hati, mencintai uang Rupiah, membangun negeri dengan pajak, menuju *Good Governance*.

Salam Sehat Semangat Produktif dan Bahagia
#Sadar dan tertib pajak
#Bayar pajaknya nikmati fasilitasnya
#Say no to freerider

M. Tunjung Nugroho

"Selamat Hari Oeang ke-75"

Voice Over : Tobagus Manshor Makmun
Narasi : Ahmad Dahlan
Videographer : Made Raditya Prayoga Samba
Markus apriandhie
Editor : Fajar Fadilah

TULANG PUNGGUNG ITU
BERNAMA PAJAK

Setiap hal yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

Dari catatan sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Soemarsaid Moertono, ada kutipan satu ajaran, suatu *piwulang*, yang ditulis awal abad ke-20. Ada empat perkara, kata ajaran ini, yang merupakan milik sebuah kerajaan. Yang pertama prajurit, yang kedua pendeta, yang ketiga saudagar, dan yang keempat petani.

Itu barangkali suatu pengakuan akan kenyataan-kenyataan sosial ekonomi yang makin nyata bahwa kerajaan harus hidup dari pajak dan bea yang berasal dari saudagar dan petani. Apalagi di zaman peradaban modern sekarang ini, hampir tidak ada negara yang benar-benar bebas dari pungutan pajak.

Arab Saudi yang merupakan negara kaya raya dari hasil minyak bumi pun sudah sejak lama memungut pajak penghasilan (PPh) badan. Bahkan sejak 2018, akibat turunnya harga minyak dunia, negara yang memiliki bandara terbesar dunia itu memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari warganya. Begitu pun Uni Emirat Arab, setelah sebelumnya memungut PPh dari perusahaan-perusahaan minyak dan cukai atas rokok dan alhohol, per 1 Januari 2018 mulai memungut PPN dari penduduknya.

Di Indonesia, pajak menopang delapan puluh persen lebih pendapatan negara. Hal positifnya, ini membuat rakyat lebih memiliki posisi tawar untuk ikut mengendalikan jalannya pemerintahan. Termasuk mengendalikan proses lahirnya regulasi perpajakan itu sendiri. Contoh nyata baru saja terjadi di depan mata kita.

Pada Kamis 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini sejatinya merupakan hasil "kompromi" antara pemerintah dengan rakyat. Dari beberapa poin usulan yang diajukan oleh Pemerintah, sebagian disetujui oleh DPR yang merupakan perpanjangan tangan dari rakyat, sebagian lainnya ditolak.

Kompromi antara DPR dan Pemerintah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Yang pertama dari sisi PPh, yakni dilebarkannya lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi yang dikenakan tarif terendah (5%). Lapisan terendah yang semula sampai dengan Rp50.000.000, diperlebar menjadi sampai dengan Rp60.000.000. Perubahan ini berdampak turunnya PPh terutang atas orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak dalam setahun di atas Rp50.000.000 s.d. Rp60.000.000.

Selain itu, bukti keberpihakan kepada rakyat kecil dalam UU HPP yakni diberlakukannya batas *(threshold)* peredaran bruto tidak kena pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp500.000.000. Artinya, UMKM dengan penghasilan bruto dalam setahun di bawah Rp500.000.000 tidak dikenakan PPh. Aturan ini sebelumnya tidak ada.

Yang kedua, dari sisi PPN. Wujud keberpihakan kepada rakyat kecil adalah adanya pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Juga diperkenalkannya skema PPN Final untuk sektor tertentu yang dimaksudkan untuk lebih memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu serta penyesuaian tarif secara bertahap sampai dengan 2025.

Hal positif lainnya bagi negara yang sebagian besar dibiayai dari uang pajak adalah pemerintah lebih punya kewajiban moral untuk terbuka dalam membelanjakan uang hasil pajak. Langkah ini sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 2016 dengan menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*tax expenditure report*). Laporan ini menjadi salah satu bentuk transparansi di bidang perpajakan. Selain itu, dengan adanya laporan ini maka efektifitas kebijakan perpajakan dapat diukur dan dilakukan evaluasi.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua karakteristik dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*. Ibarat sebuah bangunan, keduanya adalah pondasi utama dalam membangun *good governance*. Transparansi di sini bermakna bukan hanya dalam kebebasan mengakses informasi tersebut oleh rakyat, tetapi juga bermakna keputusan yang diambil pemerintah mengikuti aturan yang berlaku. Informasinya harus tersedia secara cukup, serta yang terpenting informasi tersebut harus dapat dipahami.

Akuntabilitas juga merupakan kunci utama dari *good governance*. Ini adalah perwujudan dari kewajiban pemerintah menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya. Setiap hal yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

Pajak tak hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas kepada penyelenggara negara, tetapi juga kepada masyarakat.

Di balik berlakunya sistem pemajakan *self assessment*, ada tuntutan dari negara kepada wajib pajak untuk melaporkan aktivitas keuangannya secara transparan dan akuntabel, sehingga pajaknya dapat dihitung dengan benar.

Sistem perpajakan yang kuat, idealnya, juga mampu memonitor setiap aktivitas ekonomi. Pada saat semua aliran uang dan barang bisa terdata dengan baik, kita tak perlu lagi mendengar cerita tentang *shadow economy*, pencucian uang, dan semacamnya.

Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan membuat tingkat kepercayaan wajib pajak meningkat. Kepercayaan wajib pajak yang meningkat akan mendorong mereka bersikap lebih terbuka. Lagi-lagi tentang akuntabilitas dan transparansi. Pada saat wajib pajak telah terbuka, celah untuk terjadinya *fraud* akan mengecil. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tulang Punggung itu Bernama Pajak.

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Photo Vendor

FOCUS GROUP DISCUSSION, MENITI JALAN MENUJU TRANSPARANSI

Fenomena menurunnya rasio perpajakan dibandingkan produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* selama lima tahun terakhir memerlukan analisis mendalam dan komperenhensif tentang akar masalah yang terjadi. Data yang diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 menunjukkan pajak memiliki peranan yang signifikan terhadap total APBN yaitu sebesar 70,52%. Namun, peranan yang cukup penting tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator yang terlihat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah berhasil mencapai target kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Berdasarkan teori *Slippery Slope Framework* yang dikenalkan oleh Erich Kirchler pada tahun 2007 dalam bukunya "*The Economic Psychology of Tax Behaviour*", terdapat dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni *power of authorities* dan *trust of authorities*. Kekuatan otoritas didefinisikan sebagai persepsi wajib pajak tentang kemampuan otoritas dalam mendeteksi dan menghukum pelaku penghindaran pajak, sedangkan kepercayaan kepada otoritas diartikan sebagai pendapat wajib pajak bahwa otoritas pajak telah bekerja dengan penuh kebajikan untuk kepentingan masyarakat.

Dua hal tersebut sama-sama penting dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak, tetapi masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Kekuatan otoritas yang tinggi tanpa dibarengi kepercayaan akan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*), sedangkan kepercayaan terhadap otoritas yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Apabila jenis kepatuhan yang terakhir bisa diwujudkan, maka visi dan misi DJP akan lebih mudah tercapai.

DJP telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan wajib pajak tersebut, di antaranya dengan edukasi dan kegiatan hubungan masyarakat (humas) yang efektif, memberi pelayanan yang mudah dan berkualitas, dengan tetap dibarengi pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan wajib pajak, pada Kamis (22/9) Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengundang wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama (WP K3S) skema *gross split* untuk melakukan *focus group discussion* (FGD) terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. FGD tersebut dilakukan agar KPP Migas dan wajib pajak memiliki pemahaman yang sama sehingga meminimalkan risiko sengketa di masa depan.

Wajib pajak yang hadir merupakan operator dan *silent partner* dari beberapa wilayah kerja, baik yang masih dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi. Pemilihan wajib pajak yang diundang bertujuan untuk efektifitas diskusi supaya menghasilkan kesimpulan yang konstruktif sebagai masukan kepada pengampu

regulasi. Perlu dicatat bahwa peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sampai saat ini belum terbit.

Pada FGD tersebut, dilakukan pembahasan atas enam hal, yaitu :

1. penghitungan pajak penghasilan (PPh) migas bulanan dan tahunan;
2. pembayaran PPh migas bulanan dan tahunan;
3. pelaporan PPh;
4. pembukuan;
5. pemeriksaan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa; serta
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan, tercapai kesepakatan tentang enam hal tersebut yang akan digunakan sebagai masukan kepada pengampu regulasi, yaitu:

1. penghitungan PPh bulanan dan tahunan
   a. Indonesian Crude Price (ICP) dapat digunakan sebagai nilai realisasi penjualan;
   b. terkait dengan perbedaan harga ICP dengan harga penjualan lain, sudah diatur dengan ketentuan lain yang ada;
   c. penghitungan dilakukan per bulan dengan memperhitungkan kompensasi kerugian masa sebelumnya;
2. pembayaran PPh bulanan dan tahunan
   a. PPh migas diadministrasikan sebagai PPh Pasal 25;
   b. *branch profit tax* diperhitungkan secara tahunan;
   c. sanksi mengikuti ketentuan umum perpajakan (KUP);
3. pelaporan PPh
   a. format laporan bulanan dapat menggunakan Laporan Penerimaan Negara (LPN) yang disesuaikan;
   b. SPT tahunan dilaporkan dengan format umum, tetapi Lampiran Khusus Migas tetap diperlukan;
   c. laporan keuangan tetap dibuat sesuai standar dengan memuat penghasilan dan/atau biaya sehubungan dengan pertambangan migas dan biaya operasional lain terkait;
4. pembukuan
   selain memuat pembukuan berdasarkan proporsi *participating interest* sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan migas, juga memuat pembukuan komersial jika terdapat biaya-biaya lain terkait;
5. pemeriksaan, penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa
   a. pemeriksaan dilakukan oleh DJP;
   b. pemeriksaan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa mengacu pada ketentuan umum perpajakan;
6. PBB migas
   tata cara penilaian Nilai Jual Objek Pajak untuk WP K3S Gross Split mengacu pada PMK-186/PMK.03/2019.

Selain bisa menghasilkan kesepahaman dan masukan-masukan yang konstruktif, kegiatan yang dilakukan KPP Migas tersebut diharapkan memiliki dampak positif lainnya. FGD diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak. Kepercayaan yang akan membuat mereka tak lagi ragu membuka diri menuju akuntabilitas dan transparansi. Saat hal itu terjadi, hal-hal yang disinggung di awal tulisan ini, misalnya turunnya *tax ratio* tak perlu lagi terjadi. Dengan pajak, Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdikari.

Penulis: Evie Andayani

Editor: Tobagus Manshor Makmun

MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PPH MIGAS MELALUI ANALISIS FQR

Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) merupakan satu-satunya kantor pelayanan pajak di Indonesia yang mengadministrasikan dan mengawasi pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas). PPh migas merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan target APBN setiap tahun. Target penerimaan pajak (dalam hal ini PPh migas) masuk dalam target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian, secara vertikal turun ke Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Migas. Berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) pada aplikasi appportal DJP, porsi target PPh migas terhadap target penerimaan KPP Migas dalam lima tahun terakhir dapat dihitung sebagai berikut :

dalam miliar rupiah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target KPP Migas (A)	68.541	87.152	99.866	67.398	64.876
Target PPh Migas (B)	41.770	38.134	66.154	31.859	45.769
(B)/(A)	60,94%	43,76%	66,24%	47,27%	70,55%

Pada tabel di atas terlihat bahwa porsi target PPh migas terhadap target penerimaan KPP Migas pada tahun 2021 adalah yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan PPh migas sangat berpengaruh terhadap capaian penerimaan KPP Migas tahun ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan agar target penerimaan PPh migas bisa tercapai atau melebihi yang sudah ditetapkan. Namun, hal ini bukan berarti mengesampingkan peranan penerimaan dari jenis pajak lainnya yang juga ditargetkan pada KPP Migas.

Upaya pengamanan target penerimaan PPh migas tahun 2021 dilakukan dengan cara mengawasi pembayarannya, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan selama ini dilakukan melalui kegiatan Satgas Pemeriksaan Bersama yang dimulai sejak 2018 dan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang dilakukan oleh seksi pengawasan (sesuai ND-91/PJ/2021). Namun, melihat porsi target PPh Migas tahun ini yang mencapai 70,55% terhadap target penerimaan KPP dan kebutuhan berupa kecepatan pencairan pembayaran (*fresh money*), diperlukan inovasi yang selama ini belum pernah dilakukan. Inovasi tersebut adalah dengan melakukan analisis *financial quarterly report (FQR)* final yang sudah disetujui SKK Migas dibandingkan dengan lampiran SPT tahunan PPh badan.

Untuk menjalankan kegiatan analisis secara efektif dan optimal, Kepala KPP Migas membentuk Tim Analisis FQR Final yang dituangkan dalam Keputusan Kepala KPP Migas nomor KEP-53/WPJ.07/KP.10/2021 tentang Pembentukan Tim Analisis *Financial Quarterly Report* (FQR) Final Tahun Pajak 2019 dan 2020 Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama (WP K3S MIGAS) pada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi. Wajib pajak yang dianalisis adalah wajib pajak K3S yang sudah produktif dan ETBS (*Equity To Be Split*). Susunan tim terdiri dari:

1. Ketua Pengarah (Kepala Kantor);
2. Ketua Tim Analisis (Kepala Seksi Pengawasan 1,2,3,4,5);
3. Anggota Tim Analisis (para *account representative*);
4. Anggota Tim Konsultasi (Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak); dan
5. Anggota Tim Data dan Sekretariat (Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, perwakilan pelaksana seksi PKD dan seksi P3).

Dalam melakukan analisis tersebut, diperlukan beberapa data, antara lain:

1. FQR final yang sudah disetujui oleh SKK Migas;
2. laporan penerimaan negara(LPN);
3. SPT tahunan PPh badan dan lampirannya (operator dan partner);
4. Setoran PPh migas yang diambil dari modul penerimaan negara (MPN).

Dari data tersebut, yang termasuk data internal adalah LPN, SPT tahunan dan lampirannya, serta data setoran PPh migas dari MPN. Sedangkan FQR final berasal dari SKK Migas yang diminta melalui surat resmi.

Mungkin timbul pertanyaan, “Mengapa harus meminta data FQR Final yang sudah disetujui oleh SKK Migas, padahal data tersebut ada dalam lampiran SPT tahunan PPh badan?” Memang benar data tersebut ada pada lampiran SPT tahunan PPh badan, tetapi dengan menggunakan data FQR yang sudah disetujui oleh SKK Migas maka kevalidan datanya terjamin sehingga akan menghasilkan analisis yang akurat.

Proses analisis data menggunakan basis blok migas atau wilayah kerja pertambangan migas. Satu blok migas terdiri dari operator dan partner sebagai pemegang *participating*

interest (PI). Hal ini sesuai dengan FQR yang juga dibuat berdasarkan blok (*ring fence policy*). Analis juga perlu memperhatikan data pemegang PI saat itu. PI bisa diperjualbelikan sehingga ada kemungkinan berubah setiap saat. Oleh karena itu, ketika melakukan analisis harus dipastikan kebenaran besaran PI-nya.

Dalam pelaksanaannya, analisis satu blok migas dikerjakan secara kolaboratif antara seksi pengawasan (kepala seksi pengawasan dan AR) dan fungsional pemeriksa pajak (supervisor dan timnya) yang sudah dibagi-bagi berdasarkan keputusan kepala kantor. Untuk keseragaman dan mempermudah pelaksanaan analisis, tim analisis sudah menyediakan kertas kerja analisis (KKA).

Dari hasil analisis setiap blok migas (KKA) akan didapatkan hasil PPh migas nihil, PPh migas selisih kurang dan PPh migas selisih lebih dalam tahun buku tertentu. Tindak lanjut kertas kerja analisis (KKA) adalah sebagai berikut:

1. dalam hal tidak ada selisih (nihil) maka hasil KKA dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan hasil penelitian (LHPt);
2. dalam hal terdapat selisih lebih maka digunakan untuk melakukan penelitian terkait pemindahbukuan (Pbk) dan segera disampaikan ke wajib pajak untuk melakukan Pbk;
3. dalam hal terdapat selisih kurang, ditindaklanjuti sebagai berikut:
   a. jika sedang dilakukan pemeriksaan maka hasil KKA disampaikan ke fungsional pemeriksa pajak (FPP) untuk ditindaklanjuti;
   b. jika wajib pajak telah selesai diperiksa dan telah terbit surat ketetapan pajak (SKP) maka hasil KKA dapat digunakan sebagai dasar melakukan pembetulan SKP Pasal 16 UU KUP;
   c. jika belum diperiksa maka AR mengirimkan surat ke wajib pajak agar segera melunasi pembayaran, menerbitkan surat tagihan pajak (STP) sanksi bunga, dan melakukan penelitian *all taxes*.

Analisis yang dilakukan ini merupakan sebuah ikhtiar dari KPP Migas untuk mengamankan target penerimaan yang telah diamanahkan. Namun, di samping tujuan tersebut, kegiatan ini juga bertujuan agar pelaporan dan pembayaran PPh migas yang telah berjalan dengan baik bisa semakin transparan dan akuntabel. Dua hal tersebut adalah kunci agar DJP semakin kuat demi Indonesia yang berdaulat.

Penulis: Yudhi Prayitno
Editor: Tobagus Manshor Makmun

MEMAHAMI PROSES PENETAPAN WILAYAH KERJA MIGAS

Bagaimana sebuah daerah dapat berubah menjadi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi?

Dalam perspektif regulasi di bidang minyak dan gas bumi, seluruh wilayah Republik Indonesia yang belum berstatus wilayah kerja disebut wilayah terbuka. Cakupan wilayah terbuka di antaranya :

A. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai wilayah kerja;
B. bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerja sama;
C. wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja samanya;
D. bagian wilayah kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksikan yang disisihkan atas usul kontraktor;
E. bagian wilayah kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau pernah diproduksikan yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

1. Penyiapan Wilayah Kerja

Wilayah terbuka secara bertahap akan disiapkan oleh Kementerian ESDM agar layak ditawarkan menjadi sebuah wilayah kerja kepada perusahaan atau bentuk usaha tetap. Proses penyiapan tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi penawaran wilayah kerja melalui lelang ataupun langsung. Proses penyiapan, penetapan, dan penawaran didasarkan pada aspek pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, serta berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.

2. Penyiapan Wilayah Kerja Dalam Rangka Penawaran Wilayah Kerja Melalui Lelang

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) bertanggung jawab dalam penyiapan wilayah kerja melalui lelang. Dalam melaksanakan tanggung jawab

tersebut, ia dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dan/atau data. Setelah dilakukan evaluasi teknis, ekonomi, serta pengolahan data dari wilayah terbuka, Dirjen Migas membuat usulan penetapan wilayah kerja kepada Menteri ESDM. Usulan tersebut minimum memuat:

A. batas-batas wilayah kerja;
B. prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan penawaran wilayah kerja;
C. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama.

3. Penyiapan Wilayah Kerja Dalam Rangka Penawaran Wilayah Kerja Melalui Penawaran Langsung

Dalam proses penawaran langsung, proses penyiapan dilakukan oleh Dirjen Migas berdasarkan usulan dari badan usaha atau bentuk usaha tetap. Namun, inisiatif berupa usulan tersebut hanya dapat diajukan atas wilayah terbuka yang belum dievaluasi untuk dicadangkan melalui proses lelang. Setelah dilakukan evaluasi oleh tim penilai, Dirjen Migas dapat menyetujui atau menolaknya.

Setelah persetujuan usulan, Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan badan usaha atau bentuk usaha tetap melakukan studi bersama dengan dibiayai oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengusulkan. Dalam pelaksanaan studi tersebut, Ditjen Migas dapat menyertakan pihak ketiga untuk memperoleh hasil optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tim penilai kemudian melakukan evaluasi teknis dan ekonomi atas hasil studi bersama. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar usulan kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai wilayah kerja.

Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan penawaran langsung wilayah kerja kepada Dirjen Migas sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% dimiliki oleh Negara. Usulan tersebut dapat dilakukan atas:

A. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai wilayah kerja;
B. bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerja sama;
C. wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja samanya.

4. Penetapan Wilayah Kerja

Dalam rangka proses penetapan wilayah kerja, Kementerian ESDM akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan gubernur yang wilayah administrasinya akan ditetapkan. Sebuah usulan wilayah kerja dapat meliputi satu atau beberapa provinsi di Indonesia. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya minyak dan gas bumi.

5. Lelang Wilayah Kerja

Penawaran wilayah kerja melalui lelang dan lelang penawaran langsung dilaksanakan oleh Dirjen Migas. Selain wilayah kerja yang baru ditetapkan, penawaran juga dilakukan atas wilayah kerja *available*. Wilayah kerja *available* adalah wilayah kerja yang pernah ditawarkan, tetapi tidak dapat ditetapkan pemenangnya.

Meskipun usulan penawaran langsung suatu wilayah kerja berasal dari suatu badan usaha atau bentuk usaha tetap, tetapi tidak serta merta mereka—yang juga telah membiayai studi bersama—akan ditetapkan menjadi pemegang kontrak wilayah yang diusulkan. Penawaran wilayah kerja melalui penawaran

langsung tetap harus melalui proses lelang. Namun demikian, dalarn hal hasil penilaian akhir terhadap dokumen partisipasi (*participating docurnent*) yang mereka sampaikan lebih rendah dari peserta lelang lain, badan usaha atau bentuk usaha tetap pelaksana studi bersama tersebut dapat menggunakarn hak perubahan penawaran (*right to match*) dengan ketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen keuangan.

Penawaran wilayah kerja dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Dalam pelaksanaan penawaran wilayah kerja tersebut, Dirjen Migas membentuk tim lelang dan tim penilai yang terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta ahli dari perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tim ini merniliki tugas pokok dan fungsi serta kompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum atau bidang lain sesuai kebutuhan.

Pada suatu periode penawaran wilayah kerja, Dirjen Migas menerbitkan dokumen lelang (*bid dokumen*) atas tiap-tiap wilayah kerja yang ditawarkan. Di dalam dokumen lelang tersebut peserta akan mendapatkan informasi mengenai tata cara lelang, informasi geologi, dan potensi minyak dan gas bumi *(geological synopsis)*; cadangan dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi, serta konsep kontrak kerja sama. Dokumen lelang suatu wilayah kerja dapat dibeli oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Badan usaha atau bentuk usaha tetap pembeli dokumen lelang yang berminat untuk melanjutkan proses lelang setelah menelaah isi dokumen lelang diharuskan menyerahkan dokumen partisipasi *(participating document).* Dokumen partisipasi tersebut terdiri dari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008. Selain dokumen partisipasi, peserta juga diwajibkan menyerahkan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.

6. Penilaian dan Penetapan Pemenang

Dokumen partisipasi yang telah dikirimkan oleh para peserta lelang akan dievaluasi oleh tim penilai. Evaluasi diperlukan untuk dapat memberikan hasil terbaik dan berkelanjutan atas wilayah kerja yang akan dikembangkan. Hal tersebut juga membuat tidak serta merta penawar tunggal suatu wilayah kerja akan menjadi pemenang. Kriteria penilaian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008. Tim lelang kemudian menyampaikan urutan peringkat calon pemenang lelang kepada Dirjen Migas sebagai dasar usulan kepada Menteri ESDM yang kemudian akan menetapkan pemenang lelang.

Ketika pemenang atas suatu wilayah kerja tidak sanggup memenuhi komitmen atas ketentuan setelah penetapan pemenang maka Dirjen Migas mengusulkan urutan berikutnya kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai pemenang. Apabila tidak terdapat pemenang lelang urutan berikutnya, wilayah kerja tersebut menjadi wilayah kerja *available*.

Penulis: Fatah Manohara
Editor: Tobagus Manshor Makmun

SEJARAH LAHIRNYA KPP MIGAS

Dalam cerita pewayangan terdapat kesatria kembar dari Pandawa, yakni Nakula dan Sadewa. Keduanya berparas elok, juga memiliki ilmu kanuragan yang disegani lawan maupun kawan. Mereka adalah sosok yang unik. Kemudian, meskipun kembar identik akan tetapi dua saudara ini memiliki kepribadian yang berbeda.

Nakula yang merupakan titisan Batara Aswin adalah sosok pendiam dan pemikir. Setiap hal yang dikerjakannya selalu dipahami, ditelaah, dan dimaknai secara mendalam. Seorang kesatria yang mahir menunggang kuda, melempar lembing, dan piawai menggunakan panah. Ia juga terkenal teliti dan tidak dapat lupa segala hal yang diketahuinya karena mempunyai Aji Pranawajati pemberian Ditya Sapujagad, Senapati Mretani. Pun Nakula memiliki watak jujur, setia, taat, welas asih, dan dapat menyimpan rahasia.

Si bungsu Sadewa terkenal memiliki kepandaian di atas rata-rata. Ia lihai dalam berbicara dan terampil mengemukakan pendapat. Sadewa juga memiliki kemampuan analisis yang cermat serta sikap kritis terhadap segala hal, terutama menyangkut kehidupan rakyatnya. Satu hal yang sama, keduanya merupakan komandan yang baik dalam meningkatkan semangat para senapati dan prajurit di medan laga.

Siapa sangka, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) yang merupakan KPP unik karena hanya ada satu-satunya di Indonesia dulunya merupakan KPP "kembar". Sebelum berubah nama menjadi KPP Migas, kantor ini memiliki saudara kembar yang juga berada dalam komplek pajak Kalibata: Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora).

Cikal bakal terbentuknya KPP Migas bermula pada 31 Desember 2003. Saat itu, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003, dibentuklah KPP Badora Satu dan KPP Badora Dua yang diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2004.

Sebagai kembar identik, kedua KPP ini menangani wilayah kerja yang sama, juga wajib pajak dengan kriteria yang sama: bentuk usaha tetap (BUT) dan orang asing. Hanya asal negaranya saja yang dibedakan. Pada awal berdirinya, mereka mengampu BUT dan orang asing yang berkedudukan atau bertempat tinggal di DKI Jakarta, wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, dan Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III kecuali Kota/ Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan.

KPP Badora Satu menangani wajib pajak yang berasal dari negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mayotte, Mauritius, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome, dan Principe. Saudara kembarnya, KPP Badora Dua menangani wajib pajak yang berasal dari selain negara-negara tersebut. Hal tersebut diatur pada KEP-67/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004.

Pada 2005, terjadi perubahan wilayah kerja yang harus diampu kedua KPP tersebut. Berdasarkan PER- 91/ PJ./2005 Tanggal 19 Mei 2005, KPP Badora Satu dan KPP Badora Dua hanya menangani wilayah DKI Jakarta. Namun, tidak ada perubahan pembagian asal negara.

Perubahan terjadi lagi pada 2011, yang mengakibatkan dua KPP kembar ini tak lagi identik. Per-49/PJ/2011 menetapkan bahwa KPP Badora Satu sejak tanggal 30 Desember 2011 menerima pendaftaran semua wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan dan/atau berdomisili di DKI Jakarta tanpa menyebutkan asal negaranya. Sementara itu, KPP Badora Dua bertugas melayani badan tertentu yang berkedudukan di DKI Jakarta.

Hingga akhirnya pada 2012, cerita dua KPP kembar ini berakhir dengan terbitnya Per-08/PJ/2012 tanggal 30 Maret 2012. KPP Badora Satu berubah menjadi KPP Badan dan Orang Asing. Ia tetap mengampu semua wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan dan/ atau bertempat tinggal di DKI Jakarta. KPP Badora Dua berubah menjadi KPP Minyak dan Gas Bumi dan bertugas melayani badan tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi. Sejak itulah, nama KPP Migas resmi digunakan dan berkiprah di Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini.

Dalam satu lakon, tersebut kisah Puntadewa meminta saran kepada keempat adiknya tentang niat Krisna yang ingin meminjam Jimat Kalimasada. Pusaka itu akan digunakan sebagai tumbal bagi Negara Dwaraka yang terkena bencana.

Bima, Arjuna, dan Nakula menyetujui dengan alasan Krisna adalah penasehat Pandawa yang berjasa besar. Namun, Sadewa memiliki pemikiran lain. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin sekelas Krisna yang notabene titisan Wisnu tidak mampu mengatasi masalah di negaranya.

Sadewa dengan kecermatan analisisnya bisa mendeteksi kejanggalan yang terjadi. Selain itu, dengan sikap kritisnya, ia merasa penggunaan Jimat Kalimasada sebagai tumbal adalah tindakan yang tidak etis. Kalimasada adalah dasar dan pedoman hidup bagi warga Amarta. Hal ini sama saja mencederai nilai-nilai yang ada dalam Jimat Kalimasada. Maka, ia menolak keinginan Krisna yang belakangan diketahui ternyata palsu. Dia menerima apa pun konsekuensinya walaupun harus diusir dari istana.

Demikianlah sejarah terbentuknya KPP Migas, lahir sebagai kembar identik KPP Badora dan mewarisi semangat luhur Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Ibarat Sadewa, KPP Migas harus cerdas, selalu menjaga integritas, memiliki kemampuan analisis yang cermat, serta mampu bersikap kritis demi menjaga kelangsungan negara tercinta.

Penulis: Herry Suwondo
Editor: Tobagus Manshor Makmun

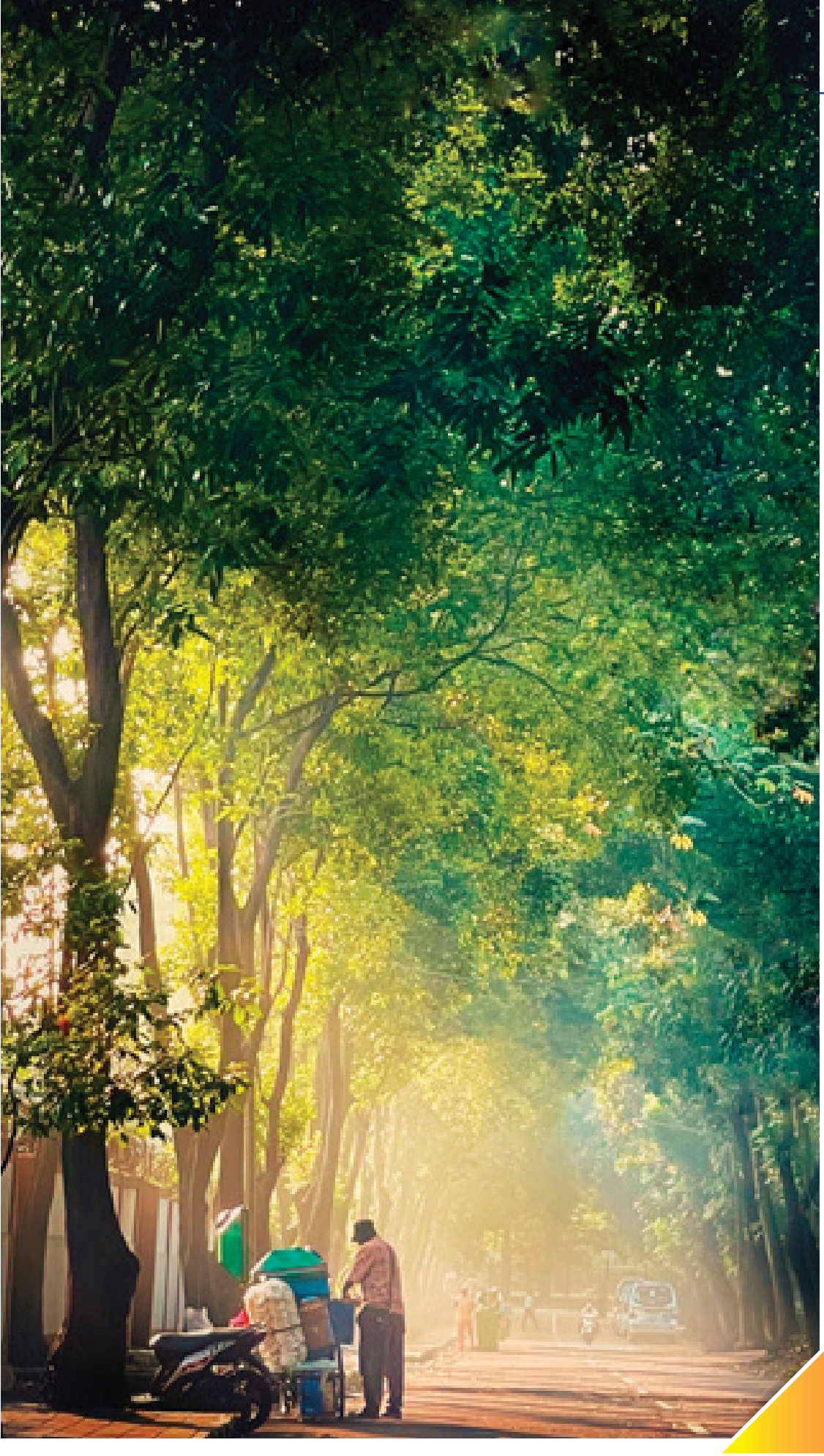

Seorang penjual kerupuk keliling di kawasan Kalibata menyiapkan kerupuk ke dalam kaleng untuk kemudian diantar ke para pelanggannya. Pelanggan utama kerupuk Bapak ini adalah pegawai di perkantoran di komplek pajak Kalibata. Semangat Bapak Penjual Kerupuk ini dalam berikhtiar di tengah pandemi yang belum juga usai, layak untuk kita teladani.

Foto : Herry Wondo
Narasi : Markus Apriandhie

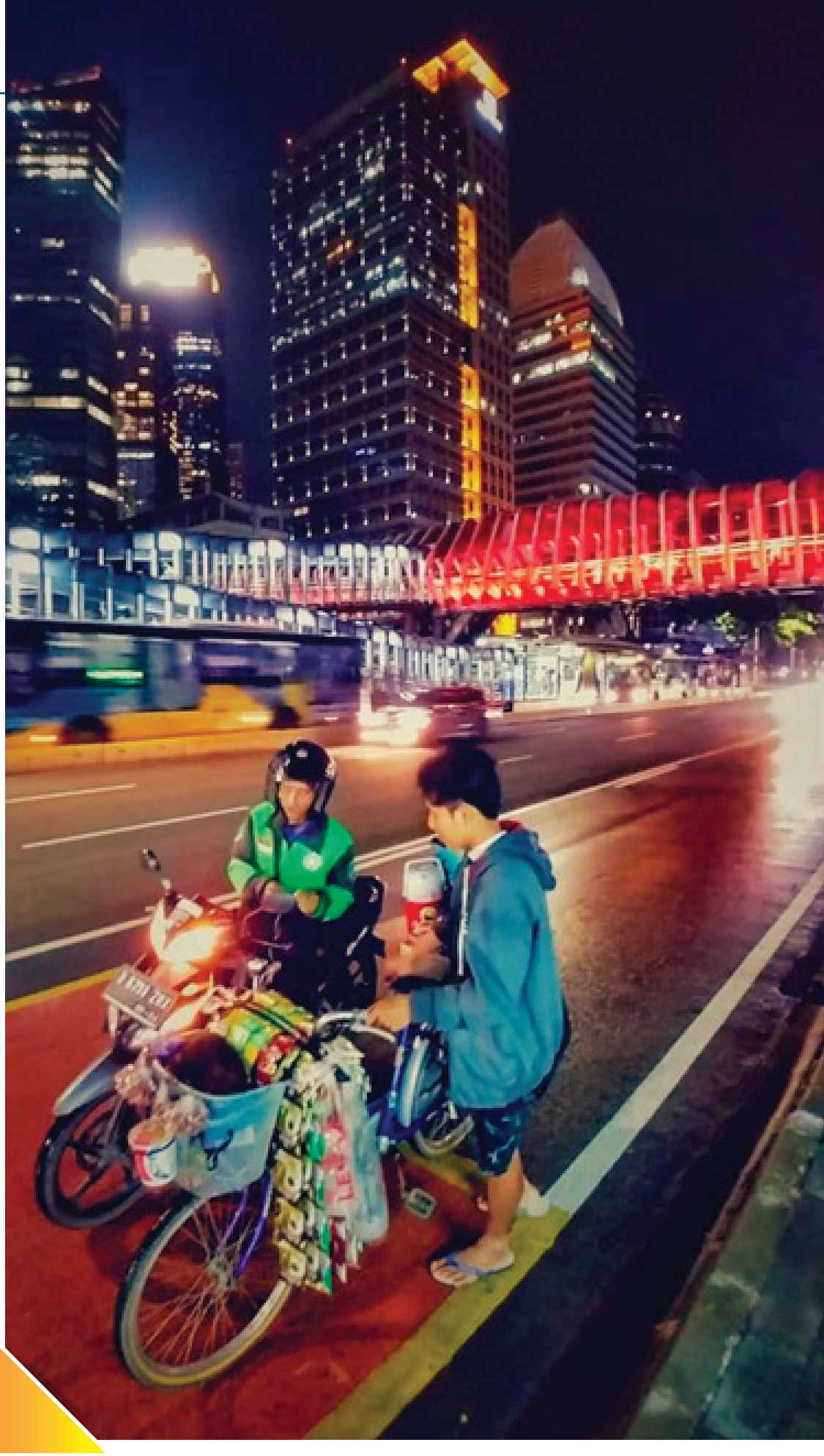

Simbiosis mutualisme. Seorang pengemudi ojek online membeli secangkir kopi panas di pedagang minuman keliling, sekadar untuk memulihkan penat. Pedagang minuman keliling senang dagangannya laku, pengemudi ojek pun senang dapat lekas melanjutkan ikhtiar mengais rezeki.

Foto : Herry Wondo
Narasi : Markus Apriandhie

Gunung Sinabung (Sumber : Koleksi Pribadi)

Energi Terbarukan,
Sebuah Catatan Perjalanan

Di bawah gunung-gunung api di Indonesia tersimpan energi panas bumi (geothermal). Beberapa di antaranya sudah digarap untuk menghasilkan jutaan kwh guna memasok kebutuhan listrik dalam negeri. Ada 69 gunung api aktif di indonesia. *Ring of fire* yang sejatinya bisa menjadi potensi bencana ini kemudian disulap oleh teknologi menjadi energi yang ramah lingkungan. Sebut saja Gunung Toba, Gunung Sinabung, Gunung Salak, Kawah Kamojang, Dataran Tinggi Dieng yang merupakan wilayah kerja pertambangan panas bumi. Ini adalah catatan penulis saat mengunjungi salah satu wajib pajak yang bergerak dalam industri tersebut.

Perjalanan dinas kali ini merupakan kali pertama yang penulis lakukan sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Demi mematuhi peraturan pemerintah, hampir dua tahun Direktorat Jenderal Pajak meniadakan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar kota. Pada September 2021, kabar baik mulai terdengar. Seiring gencarnya program vaksinasi dan pembatasan darurat selama kurang lebih dua bulan sebelumnya, tingkat positif kasus COVID-19 Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Sebelum melakukan perjalanan, kami diwajibkan melakukan tes *polymerase chain reaction* (PCR) COVID-19 sebagai syarat kelengkapan penumpang pesawat terbang.

Alhamdulillah, seluruh anggota tim terkonfirmasi negatif dari virus SARS-CoV2.

Bagi penulis pribadi, ini merupakan pengalaman kedua mengunjungi lokasi usaha wajib pajak yang bergerak dalam bidang pengelolaan energi baru dan terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa dimanfaatkan terus menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas, bisa diperbarui secara terus menerus, dan ketersediaannya di alam melimpah, salah satunya adalah energi panas bumi.

Pada kesempatan kali ini, penulis dan tim mengunjungi Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Medan (KIM), 15 km dari Pelabuhan Belawan. Di tempat ini importir mesin-mesin industri dan suku cadang di wilayah tersebut menyimpan barang-barang impornya sebelum dirilis ke lokasi usaha. Biaya sewa di PLB lebih murah dibandingkan jika disimpan di pelabuhan. Salah satu importir tersebut adalah PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), wajib pajak yang terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas).

PT SMGP merupakan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh International Company KS ORKA dengan target produksi 240 MW dan berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pembangunan *power plant* kali pertama dimulai pada November 2017. Hal itu dilakukan setelah PT SMGP menyampaikan hasil studi kelayakan kepada PT PLN dan Kementerian ESDM pada Agustus 2017 yang mengonfirmasi potensi energi sebesar 50 MW pada penambangan di Wellpad A. Pada 2020, produksi perusahaan ini mencapai 334 juta kwh. Jika diilustrasikan, produksi tersebut dapat mengaliri listrik ke satu juta rumah dengan pemakaian listrik 334 watt/bulan.

Kegiatan konstruksi PT SMGP hingga kini masih berlanjut sebagai usaha merealisasikan target penyediaan listrik kepada PT PLN. Oleh karena itu, pembelian barang modal untuk pembangunan PLTP ini masih secara rutin dilakukan. Berdasarkan keterangan wajib pajak, hampir 90% merupakan barang impor. Hal ini menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja dari KPP Migas, yaitu dalam rangka mengonfirmasi lebih lanjut barang modal yang didaftarkan oleh wajib pajak untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN Impor Barang Strategis.

PT SMGP mengimpor seluruh barang utama untuk proses konstruksi PLTP dari Zhejiang Kaishan Energy Equipments Co., Ltd. di Cina. Barang-barang tersebut kemudian dikirim dari PLB ke lokasi penambangan panas bumi dengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu sekitar 12 jam dari kota Medan. Bahkan, untuk membawa alat berat jenis tertentu memerlukan waktu lima hari perjalanan. Hal itu terjadi karena syarat kecepatan kendaraan, waktu perjalanan yang hanya dibolehkan pada malam hari, serta lokasi industri geothermal yang berada di wilayah dataran tinggi.

PLTP menjadi salah satu proyek strategis di Indonesia karena besarnya potensi bumi pertiwi pada bidang ini. Menurut portal Kementerian ESDM, sumber daya energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5 giga watt electrical (gwe) yang terdiri dari *resources* 11.073 mw dan *reserves* 17.453 mw. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.

Energi panas bumi diklaim sebagai energi yang paling ramah lingkungan karena emisinya lebih rendah dibanding bahan bakar lainnya. PLTP menggunakan bahan bakar panas bumi yang diolah dengan perangkat tertentu untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin penghasil listrik. Ini menjadi gagasan yang baik di tengah isu perubahan iklim dan pemanasan global.

Pada 2015, saya mengunjungi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Sumatera Selatan. PLTU tersebut dibangun tepat di ujung mulut tambang batu bara untuk menghemat biaya transportasi.

Pengecekan Barang Impor (Sumber : Koleksi Pribadi)

Buangan atau limbah dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara lebih polutif dan biaya produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan PLTP.

Mengunjungi langsung tempat-tempat ini tidak hanya memberikan tambahan pemahaman tentang proses bisnis pelaku usaha di bidang energi, tetapi juga menambah wawasan bagi kami untuk semakin percaya bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Hanya satu yang belum banyak berubah: teknologi untuk mengelolanya masih saja impor, baik tenaga ahli maupun perangkatnya.

Pulang bertugas, untuk mengurai kepenatan, kami mampir ke kedai kopi. Saya mencoba kopi Sumatera dalam bentuk olahan favorit saya: kopi sanger. Perjalanan kali ini—seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya—banyak dimudahkan karena pegawai pajak tersebar di seluruh Indonesia. Kami mendapatkan bantuan dari pegawai yang bertugas di wilayah Medan dan sekitarnya. Mereka memberikan rekomendasi kuliner khas Medan seperti mie aceh, kedai kopi, tempat makan durian, hingga tempat belanja oleh-oleh.

"Jangan pernah lelah mencintai negeri ini" adalah salah satu kutipan favorit penulis yang diucapkan Sri Mulyani. Sebuah pesan sederhana yang penulis simpan erat dalam hati. Rasa itu semakin menggeliat ketika kami mendapat kesempatan melihat kekayaan alam Indonesia yang tersembunyi. Semoga keberkahannya dapat dirasakan oleh seluruh penduduk negeri.

Penulis: Ifta Ilfia Utami
Editor: Tobagus Manshor Makmun

Iwan Djuniardi,

VISIONER YANG SETIA PADA PROSES

Syahdan, pada awal 1995, Jonifar Abdul Fatah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) bertanya kepada seorang pegawai baru, "Kamu anak ITB, *kan*? *Ngapain* anak ITB masuk pajak?" Lazimnya, seorang pegawai baru—dengan kultur birokrasi yang saat itu masih kental berbau feodal—tidak akan berani mengangkat muka saat ditanya kepala kantor. Namun, hal itu tidak berlaku untuk pegawai yang ini. "Saya akan membuat perbedaan, Pak." Sebuah jawaban yang kelewat berani. Belum cukup, ia menambahkan, "Pajak butuh saya karena saya berbeda. Saya insinyur, saya akan melakukan pendekatan yang berbeda."

Sang Kepala Kantor terkejut mendapat jawaban seperti itu. "Buktikan kalau kamu memang bisa membuat perbedaan," ujarnya. Saat itu, KPP PMA adalah salah satu kantor dengan beban pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbanyak. Dalam situasi seperti itu, pekerjaan masih dilakukan secara manual. Si Pegawai Baru ditantang untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. "Kamu saya kasih waktu tiga bulan. Kalau gagal, berarti gelar ITB-mu begini," kata Jonifar sambil mengarahkan jempol ke bawah.

Itu adalah sekelumit kisah awal perjalanan Iwan Djuniardi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Status yang masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak

> "Jangan pernah pamrih dan setialah pada proses," ujarnya. "Kalian jangan ***seeing then believing,*** tapi harus ***believing then seeing.***

membuatnya gentar. Tantangan tersebut ia jawab dengan membuat sistem pengawasan serta kertas kerja pemeriksaan berbasis excel dan *macro*, sebuah lompatan jauh pada zamannya. Dengan bimbingan tentang alur PPN dari Sigit Priadi Pramudito (Dirjen Pajak periode 2015) yang saat itu menjabat Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan, ia menyelesaikan tugas dalam waktu dua bulan, sebulan lebih cepat dari waktu yang diberikan. Pencapaian yang membuatnya mendapat apresiasi luar biasa.

"Saya tak pernah jadi pelaksana," ungkap Iwan saat kami temui di kantornya pada Selasa (19/10). Sehari setelah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil pada 1 April 1995, ia langsung dipromosikan menjadi Kepala Subseksi Verifikasi PPN KPP PMA.

Itulah Iwan Djuniardi. Jauh sebelum menjadi pejabat tinggi, ia telah bersinar di awal karir. Tak heran, banyak penghargaan yang diperolehnya di kemudian hari bersama DJP. *The Most Innovative* CIO yang didapat dalam gelaran iCIO Awards (2017), penghargaan tertinggi di bidang *Operational Excellence* dalam ajang Teradata EPIC Award (2017), *Digital Transformer of The Year* dari International Data Corporation (2018), dan *Top Leader on Digital Implementation* 2020 versi majalah It Work (2020) adalah sedikit dari banyak penghargaan yang pernah ia dapatkan.

Melihat pencapaian-pencapaiannya, orang tak akan menyangka bahwa Iwan muda termasuk anak bandel. Terlahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, Iwan sering terlibat dalam perkelahian. "Ayah saya bilang waktu itu, '*Lu* kalau *gak diberesin* bakal jadi preman.' Saya waktu muda memang terlalu energik," tuturnya.

Saat melakoni Sekolah Menengah Pertama, Iwan mengikuti bela diri karate. Tak sekadar main-main, menginjak kelas dua Sekolah Menengah Atas, ia yang telah mencapai dan I berhasil meraih juara nasional. Prestasi tersebut berulang saat Iwan menjadi mahasiswa tahun pertama di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia berhasil menjadi juara nasional tingkat mahasiswa.

Karate menorehkan kenangan tersendiri bagi Iwan Djuniardi. Ketika itu tahun 1992, ia telah lulus kuliah dan cukup lama vakum dari dunia karate. Orang tua menginginkannya mengikuti Pekan Olahraga Daerah (porda) Jawa Barat, mewakili Bogor. Ia mengiyakan. Namun, Iwan terkejut saat mengetahui bahwa yang tersisa tinggal kelas bebas—yang terkenal brutal karena berisi atlet dari semua kelas. Tekad keras membuatnya berhasil menembus babak final. Lawan yang dihadapi adalah peraih medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia dengan berat delapan puluh kilogram. Iwan sendiri hanya memiliki berat badan 58 kilogram

"*Tapi* ia sombong, meremehkan. Siapa Iwan?

Sementara itu, dia baru saja menjadi juara Asia. Dalam karate, semakin sombong seseorang maka pertahanannya semakin terbuka," tutur Iwan. Sebuah pelajaran agar jangan pernah dikalahkan kesombongan.

Sebenarnya Iwan memiliki kesempatan kuliah di Perancis. Namun, beasiswa dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tersebut harus ia lepaskan karena orang tua tidak mengizinkan. Ia lalu masuk jurusan teknik mesin pada Institut Teknologi Bandung pada 1986 melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK).

"Saya sebenarnya tak terlalu suka jurusan itu," ungkap Iwan. "Saya tidak suka mata kuliah gambar mesin, padahal di situ diajarkan selama enam semester," imbuhnya sembari tertawa. Faktor orang tua lagi-lagi menjadi salah satu pertimbangan. "Keluarga saya keluarga Unpad. Lalu, orang tua saya bilang, mereka ingin anaknya ada yang kuliah di tempat yang sama dengan tempat kuliah pacar kakak saya. Dia anak ITB," ujarnya.

Ketika kuliah, Iwan muda mulai mencari uang tambahan. Beragam aktivitas ia lakukan, mulai dari memberikan les, melatih karate, hingga mengamen. "Mengamen itu belajar untuk gak punya malu. Latihan mental," tuturnya mengenang.

Saat itu, ayahnya adalah seorang wakil bupati. Cukup mengherankan, seorang anak wakil bupati sampai harus mencari uang tambahan. "Saya walaupun anak pejabat, tetapi dikasih uangnya *ngepas*. Sebenarnya cukup kalau hanya untuk hidup sehari-hari. *Tapi* waktu itu, *kan*, saya mulai pacaran. Duitnya jadi *gak* cukup," tutur Iwan sambil tergelak.

Di luar kegiatan kuliah dan aktivitasnya untuk memperoleh uang tambahan, Iwan juga aktif di komunitas seni Sunda. Ini membuatnya piawai memainkan alat musik tradisional, misalnya kecapi dan gendang.

Setelah lulus sarjana pada 1992, dengan uang hasil meraih medali emas karate pada porda Jawa Barat, ia mendaftarkan diri untuk meneruskan kuliah strata dua. Lagi-lagi ia memilih ITB. Gelar magister manajemen berhasil ia dapatkan pada 1994.

Sebelum bekerja di DJP, Iwan sempat diterima di Total Indonesia. Tak sekadar diterima, ia meraih peringkat pertama dalam tes calon pegawai. Gaji yang ditawarkan pun cukup

menggiurkan, US$3.000. Ia bekerja selama enam bulan sebelum memutuskan keluar. Sebuah keputusan yang dipertanyakan oleh banyak orang saat itu. “Bahkan, saya didatangi orang Perancis. Kata dia, kalau misalnya saya tidak puas bekerja di Indonesia, saya bisa memilih untuk bekerja di Total Perancis,” ungkapnya.

Lantas, apa alasannya? Sekali lagi, Iwan memilih mengikuti perintah orang tua. “Bagi saya, orang tua itu nomor satu,” tuturnya. “Kakak saya seorang geolog. Pernah jatuh waktu naik helikopter. Ia selamat, tapi setelah itu pindah jadi pegawai negeri sipil. Saat saya diterima di Total, ibu saya *nanya*, kerjanya di mana? Naik apa? Saat tahu kalau saya bekerja di Kalimantan dan mengharuskan untuk naik helikopter, beliau langsung menyuruh saya keluar.”

Pada 1995, Iwan mulai bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan ditempatkan di seksi PPN KPP Penanaman Modal Asing. Sistem pengawasan, juga kertas kerja pemeriksaan berbasis excel dan *macro* yang diceritakan pada awal tulisan ini sebenarnya bersumber dari ketidaksukaannya pada pekerjaan yang berulang. “Kalau suatu pekerjaan bisa dilakukan secara automasi, saya akan lakukan automasi.”

Direktorat Peraturan Perpajakan menjadi tempat Iwan melanjutkan langkah. Ia dipromosikan pada 1999 menjadi kepala seksi pada subdirektorat PPN. Tidak banyak pegawai yang bisa dipromosikan langsung ke kantor pusat DJP. Hal ini menunjukkan kualitas yang dimiliki seorang Iwan Djuniardi.

Setelah itu, pada 2002, ia dimutasi menjadi Kepala Seksi PPN KPP Gambir Satu. Di tempat itu, ia kembali berinovasi dengan membuat aplikasi sistem manajemen pengawasan terintegrasi (simpati). Aplikasi tersebut sempat dipresentasikan di depan Hadi Purnomo, direktur jenderal pajak saat. Sang Dirjen pun berkomentar, “Saya tahu Gambir Satu canggih, tapi saya tak menyangka secanggih ini.”

Baru dua tahun di KPP Gambir Satu, pria yang naik haji pada 2003 ini kembali dimutasi. Kali ini, ia menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Madya Jakarta Pusat. Inovasi memang telah

menjadi darahnya. Ia kembali membuat aplikasi bernama *compliance model mapping*, cikal bakal *compliance risk management* (CRM) yang digunakan DJP saat ini.

Promosi menghampirinya pada 2006. Ia diangkat menjadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Posisi tersebut hanya didudukinya selama enam bulan. Setelah itu, pada 2007 ia dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Jabatan ini juga tak lama ia emban. Pada tahun yang sama, pria tiga anak ini dimutasi menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Pada 2011, usai membenahi bagian umum, ia diamanahi jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Iwan juga pernah menduduki jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada 2013, sebelum akhirnya mendapatkan promosi dan diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

Lumrahnya, seseorang akan senang saat mendapatkan kenaikan jabatan, apalagi jabatan eselon dua yang selevel dengan jenderal bintang satu pada militer. Namun, hal berbeda terjadi pada Iwan Djuniardi. “Saya menangis di depan istri. Saya takut tak mampu,” tuturnya.

Hal pertama yang dilakukan penggemar tenis meja ini sebagai direktur adalah belajar. “Selama dua sampai tiga bulan pertama, saya selalu datang jam enam pagi. Kebetulan ada pegawai yang tidur di kantor. Tiap hari, dari jam enam sampai jam delapan, saya belajar segala sesuatu tentang IT,” cetusnya. Walaupun mengaku bukan orang IT, ia tercatat sebagai direktur IT terlama di DJP. “Saya jadi direktur di Direktorat TIP, lalu TTKI (Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi), hingga TIP dan TTKI dilebur menjadi direktorat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi),” tuturnya. Karirnya semakin moncer saat 4 Oktober 2021 kemarin, ia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Iwan mengaku tak memiliki tip khusus dalam menjalani karir. “Jangan pernah pamrih dan setialah pada proses,” ujarnya. “Kalian jangan *seeing then believing*, tapi harus *believing then seeing*. Orang yang berpikir *seeing than believing* akan selamanya menjadi *follower*. Kamu harus *believe* dulu. Belajar, kamu yakini sesuatu, *curious* tentang sesuatu, lalu wujudkan walaupun belum ada *benchmark*-nya.”

“Untuk mewujudkan *believing then seeing*, kalian harus belajar manajemen risiko, visioner, juga *data analytic*. Ada empat kultur untuk bisa mewujudkannya. Yang pertama harus *customer centric*, memaksa otak kita untuk mengetahui kemauan *customer*, juga belajar *behaviour customer*. Yang kedua adalah mental *data-driven*, menggunakan data dan teknologi untuk *leverage performance*. Lalu, yang ketiga, jadikan inovasi sebagai budaya sehari-hari, sebagai darah kita. Yang terakhir, *embrace the risk*, merangkul risiko,” lanjutnya.

Pria yang tak pernah merasa menjadi pejabat ini juga mengatakan, terdapat dua tipe orang saat menghadapi masalah. “Tipe pertama *playing victim*. Orang seperti ini selalu menyalahkan orang lain dan merasa dirinya adalah korban. Tipe yang kedua, *survivor*. Orang yang selalu bertanya apa yang salah dengan diri saya? Apa yang harus saya perbaiki?” cetusnya. “Jadilah *survivor*. Jangan takut dengan perbedaan karena perbedaan adalah anugerah.”

Menutup pembicaraan, ia berpesan untuk tetap menjaga semangat, melakukan yang terbaik, dan selalu menjaga integritas. “Integritas itu satu, lainnya nol. Seberapa pun kamu melakukan banyak hal, tanpa integritas hanya akan menjadi nol besar, tak akan bernilai,” pungkasnya.

Penulis: Tobagus Manshor Makmun
Editor: Tobagus Manshor Makmun
Foto: Fajar Fadilah

BADMINTON, OLAHRAGA ALTERNATIF SAAT PANDEMI

"Abi, kapan kita main badminton?" tanya anak saya, menagih janji. Sudah lama kami tidak memainkannya. Terakhir yang saya ingat, kami bermain badminton ketika usianya tiga atau empat tahun. Itu pun menggunakan raket dan kok yang terbuat dari plastik. Saat ini usianya beranjak delapan tahun. Jika raket tersebut ia gunakan lagi, kemungkinan besar akan patah setelah 4–5 kali pukulan. Saya segera mengambil motor dan memacunya ke toko olahraga di dekat rumah; mencari raket yang cocok digunakan olehnya.

Saya memarkir motor di depan toko itu. Sebuah toko kecil dengan pintu dan dinding yang terbuat dari kaca. Di dalamnya, terlihat bermacam alat olahraga yang ditata dengan apik. Kebanyakan yang dijual adalah perlengkapan untuk badminton, seperti raket, senar raket, kok, *grip* untuk pegangan raket, pakaian olahraga, tas raket, hingga sepatu. Tak banyak waktu yang saya habiskan di sana. Saya hanya membeli raket dan beberapa kok, kemudian pulang.

Dalam perjalanan pulang saya merenung. "Sebagian orang menyebut olahraga menepuk kok menggunakan raket ini dengan nama badminton, sebagian lagi menamakannya bulu tangkis. Apa, ya, bedanya badminton dan bulu tangkis?" Lalu, saya mencari informasi di internet. Ternyata, badminton adalah salah satu kata serapan dari bahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan pengertian bulu tangkis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu *permainan dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan; badminton.*

Permainan ini populer di Indonesia. Semangat Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dalam merebut medali emas di sektor ganda putri pada Olimpiade Tokyo 2020, perjuangan Leani Ratri Oktila di balik tiga medali, dua medali emas pada kategori ganda putri dan ganda campuran serta satu medali perak pada kategori tunggal dalam pentas Paralimpiade Tokyo 2020, dan pergulatan Tim Bulu Tangkis Indonesia dalam Sudirman Cup 2021 yang diselenggarakan di Vantaa, Finlandia membuat permainan bulu tangkis semakin diminati masyarakat Indonesia.

Sebelum bermain bulu tangkis, kita perlu mempersiapkan beberapa perlengkapan. Saya tidak akan membahas teknik bermain bulu tangkis karena saya bukan ahlinya. Namun, saya akan mencoba menjelaskan perlengkapan dasar yang perlu dipersiapkan ketika bermain bulu tangkis.

1. RAKET

Tahukah anda? Dahulu, raket dibuat dari kayu. Kemudian, alumunium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon (plastik bertulang grafit). Serat karbon memiliki kelebihan karena memiliki bobot ringan, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket.

2. SENAR

Salah satu bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senar. Jenis senar berbeda akan menghasilkan efek tolakan yang berbeda pula. Senar raket badminton juga memiliki tarikan yang biasanya diatur oleh alat untuk menganyam senar ke raket. Tiap raket ada batas maksimum untuk dianyam, Anda bisa lihat di gagang raket, biasanya terdapat rekomendasi tarikan minimum dan maksimum raket.

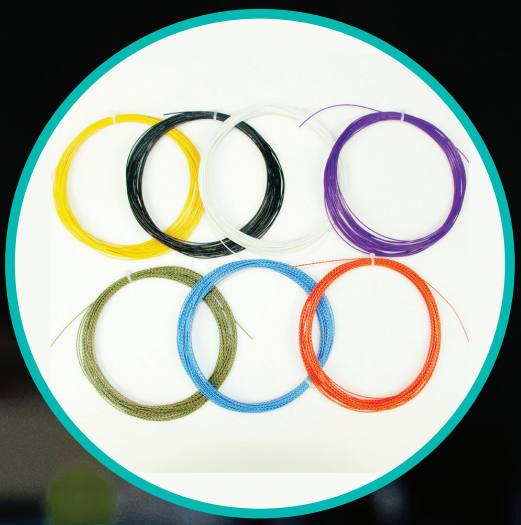

Suatu saat, saya mendengar seorang pembeli di toko olahraga bertanya, “Senar merk ini bisa berapa tarikan?” Berapa tarikan? Saya penasaran. Lantas, saya mencari informasi di internet. Ternyata, tension atau tarikan senar sangat penting dalam olahraga badminton karena dari tension ini anda dapat mengukur kekuatan pukulan untuk memukul atau mengendalikan kok. Untuk pemula seperti saya, biasanya tension senar yang direkomendasikan antara 20-24 lbs. Hal ini membuat pukulan lebih ringan karena tidak membutuhkan banyak tenaga.

3. KOK

Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Ia terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik kok:

- kok harus tersusun dari 16 bulu dan digabung menjadi satu kesatuan yang kuat;
- panjang bulu harus memiliki panjang yang sama, yaitu antara 62 mm dan 70 mm;
- ujung dari bulu-bulu harus membentuk lingkaran dengan panjang diameter antara 58 mm dan 68 mm;
- pangkal kok yang berbentuk setengah bola harus memiliki panjang diameter antara 25 mm dan 28 mm;
- berat kok seluruhnya harus antara 4,47 gram dan 5,50 gram.

4. SEPATU

Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkeraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bermain bulu tangkis mengakibatkan banyak stres pada lutut dan pergelangan kaki.

Setelah mempersiapkan perlengkapan di atas, jangan lupa satu hal lagi yang tidak kalah penting. Apa itu? Lawan bertanding. Akan terlihat lucu jika lawan bertanding kita adalah sebuah dinding. Hehe ....

Sudah hampir dua tahun kita hidup berdampingan dengan Covid-19. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kebiasaan baru untuk beradaptasi dengannya. Untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, kita dianjurkan untuk berolahraga, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang cocok dilakukan karena senantiasa menjaga jarak, baik dengan pasangan bermain maupun dengan lawan kita.

Yuk, kita bermain badminton. Semoga dengan berolahraga tubuh kita menjadi sehat dan semakin sehat sehingga kita dapat beribadah, bekerja, bersilaturahmi, dan melakukan aktivitas lainnya. Jangan lupa pemanasan sebelum berolahraga. Saya ambil galah dahulu untuk mengambil kok yang disangkutkan anak saya di pohon depan rumah.

Penulis: Aditya Pradana Putra
Editor: Tobagus Manshor Makmun
Foto: Jier Chen dari Pexels, id.carousell.com, google

BNR, One Stop Travelling di Bogor

Sebagai penyangga ibu kota, Bogor dianggap sebagai tempat yang mampu memberikan ketenangan dan kesejukan. Banyak orang datang ke Bogor untuk sejenak keluar dari hiruk pikuk ibu kota dengan segala kesibukannya yang melelahkan.

Dilihat dari letak geografisnya, Bogor memang dipenuhi dengan spot-spot wisata alam. Namun, di sini Anda tidak hanya bisa menikmati tempat wisata yang benar-benar masih alami. Beberapa pengembang perumahan di Bogor berhasil membuat kawasan perumahan sekaligus menjadi kawasan wisata yang dilengkapi aneka macam wahana dengan tetap menyertakan pemandangan alam pegunungan yang eksotis. Salah satu kawasan wisata tersebut ada di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR). Di bawah pengembang PT Bakrieland Development Tbk (Bakrieland), kawasan BNR yang mempunyai luas area ±300 hektar berhasil disulap menjadi kawasan yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan komersial, dan kawasan rekreasi.

Dengan letak yang tidak jauh dari pusat kota Bogor, akses yang mudah dijangkau, serta dekat dengan pintu keluar tol, BNR banyak dikunjungi wisatawan lokal dan orang-orang dari kota-kota sekitar. Beberapa tujuan wisata di lingkungan perumahan BNR antara lain: The Jungle Water Park, kawasan wisata belanja Orchid Park,The Illution Bogor dan Jungle Festival (Junglefest). Sebagai informasi, saat ini Junglefest sedang dalam perbaikan karena beberapa wahananya sudah lama tidak digunakan.

Selain kawasan wisata, Bogor Nirwana Residence juga dilengkapi dengan hotel-hotel berbintang yang dapat dijadikan tempat istirahat setelah berekreasi. Sebut saja Aston Bogor Hotel & Resort, hotel bintang empat ini siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke kawasan BNR. Ada juga Padjajaran Suites Hotel yang menawarkan tempat menginap dengan suasana asri dan nyaman. Tak berlebihan kalau kawasan perumahan BNR ini direkomendasikan sebagai tempat *staycation* (*stay* sambil *vacation*) di Bogor.

Dari beberapa tempat wisata di area Perumahan Bogor Nirwana Residence, saya tertarik untuk mengulas salah satu hotel yang letaknya di ujung perumahan. Ini adalah pengalaman pribadi saya saat berkesempatan menginap

bersama keluarga di hotel tersebut.

Yess ....

Padjadjaran Suites Resort & Convention Hotel Bogor.

Hotel yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Inner Ringroad Lot XIX C-2 No 17. Kota Bogor ini mengusung tagline "*the biggest and best venue for mice in* Bogor". Dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan tepat di depan lobi, menjadikan hotel ini memiliki suasana asri dan nyaman untuk dijadikan tempat rehat bersama keluarga.

Sebelum masuk lobi hotel, kami sudah disambut oleh petugas hotel yang berjaga di depan untuk memastikan para pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dan memakai masker adalah hal yang wajib dilakukan sebelum dilakukan pengukuran suhu tubuh.

Saat kami akan memasuki lobi hotel, teriakan kecil anak ketiga saya membuyarkan konsentrasi. Ternyata, di samping pintu masuk lobi hotel ada kolam kecil berisi ikan koi yang menarik perhatiannya. Ya, di samping kiri dan kanan sebelum masuk lobi hotel terdapat dua buah kolam ikan yang akan mencuri perhatian pengunjung.

Saya lantas menemui petugas resepsionis untuk mengonfirmasi pesanan kamar yang telah dilakukan melalui salah satu aplikasi daring. Tidak menunggu lama, kunci untuk dua kamar sudah saya pegang. Hari ini, saya memesan dua kamar tipe *deluxe* dengan harga Rp512.000,00 per kamar, sudah temasuk sarapan untuk dua orang di masing-masing kamar. Setiap *staycation* bersama keluarga, saya selalu memesan dua kamar karena anak pertama saya sudah beranjak dewasa dan butuh privasi. Saya sebenarnya berharap mendapatkan dua kamar dengan pintu terhubung satu kamar dengan kamar yang lain, tetapi tidak dapat terpenuhi karena okupansi hotel sudah lebih dari 80%.

Padjajaran Suite memiliki tiga tipe kamar: *deluxe*, eksekutif, dan *royal suite*. Kamar tipe *deluxe* yang saya pesan cukup luas, dilengkapi dengan fasilitas kamar antara lain: televisi 42 inci dengan

saluran lokal dan internasional, meja kerja, sofa santai, pembuat kopi, telepon, pendingin udara, *deposit box* dan lemari pakaian.

Room amenities cukup lengkap dengan dua set sandal hotel di setiap kamar, *safety box* lengkap dengan Al Quran dan sajadah, tetapi tidak ada kulkas. Sayangnya, kamar di sini kurang kedap suara sehingga keriuhan tetangga sebelah kamar terdengar jelas. "Abaikan," pikir saya dalam hati, yang penting kami bisa beristirahat setelah seharian penuh menikmati wahana air The Jungle yang berada di dekat hotel ini.

Rasa lelah sudah menghampiri saya sedari tadi karena seharian penuh mengawasi anak-anak bermain di wahana air. Namun, celotehan, rasa penasaran, dan keinginan anggota keluarga untuk menjelajah lebih jauh area hotel mengalahkan semuanya.

Waktu menunjukan pukul 17.00 WIB. Setelah beristirahat dan membersihkan badan, saya mengajak anak-anak berkeliling area hotel. Di belakang hotel, ada kolam renang yang bersih dan berdekatan dengan musala. Sepanjang jalan menuju area belakang hotel, kami melewati beberapa fasilitas hotel lainnya, seperti: pusat kebugaran yang cukup luas dengan peralatan *fitness* dan *treadmill*, aula besar, juga restoran yang diberi nama Bale Bancakan Resto dan Lobby Lounge. Bale Bancakan Resto menyediakan makanan prasmanan untuk sarapan pagi. Ia menyajikan masakan khas Indonesia dan Eropa dengan area yang luas (*indoor* dan *outdoor*).

Lelah mengelilingi area hotel, kami pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai muslim. Selesai salat Magrib, saya kembali mengajak keluarga kecil saya untuk jalan-jalan di sekitar hotel. Kali ini, saya menawarkan untuk mencari kudapan malam yang ada di luar area hotel, tetapi masih di dalam area perumahan BNR.

Ditemani gemerlapnya lampu penerangan jalan, kami berkeliling untuk sekadar tahu suasana malam di komplek perumahan yang terbilang elit di kawasan Bogor ini.

Kami berhenti sejenak di salah satu spot kuliner yang berada persis di depan wahana air The Jungle. Di area ini tersedia banyak warung makan dan warung kopi yang bisa disinggahi para pengunjung untuk sekedar nongkrong santai bersama keluarga, teman, atau bersama komunitas yang sehobi. Terbukti, pada malam ini banyak pengunjung dari berbagai kalangan, juga komunitas-komunitas yang datang dari berbagai lokasi lain di sekitar Bogor. Tidak terasa, kami telah satu jam berada di tengah keramaian. Akhirnya, kami putuskan kembali ke hotel untuk beristirahat dan melanjutkan penjelajahan wisata esok hari.

Keesokan harinya, saat kami *check out*, resepsionis memberi tahu bahwa di perumahan BNR juga terdapat

arena permainan anak-anak yang bertema edukasi mancakrida (*outbound*). Arena tersebut bernama J'Bound. Dalam perjalanan pulang, kami mencari tempat itu. Setelah menemukannya, kami singgah sejenak untuk menikmati permainan dimaksud.

Area permainan J'Bound cukup bagus untuk anak-anak. Selain mengusung tema mancakrida, terdapat juga wahana "*feeding animal*" atau memberi makan hewan. Beberapa hewan jinak dan peliharaan yang ada di wahana ini, antara lain: kelinci, kambing, dan rusa. Kita dapat memberi makan langsung dengan membeli makanan yang telah disediakan oleh pengelola. Satu keranjang kecil makanan hewan dijual dengan harga Rp20.000,00.

Selesai menikmati wahana J'Bound, kami melanjutkan perjalanan. Rumah telah menanti dengan segala kesibukan dan aktivitas rutin mulai esok hari. Dua hari satu malam ini berlalu begitu cepat karena saya menghabiskannya di tempat apik dengan keluarga tercinta menemani.

Saya rasa, tak ada ruginya Anda mencoba. Perumahan Bogor Nirwana Residence adalah salah satu tujuan wisata dengan konsep *"One stop travelling"*. Cukup mengunjungi satu tempat saja, Anda sudah bisa berwisata, beristirahat, dan bermain dengan orang-orang tercinta. *Let's staycation* in Bogor ....

Penulis: Didi Mulyadi
Editor: Tobagus Manshor Makmun

Singgah di Warung Pesinggahan Bali

Pandemi Covid-19 membuat wisatawan gigit jari sepanjang tahun lalu, bahkan hingga saat ini. Kekhawatiran tertular, pembatasan perjalanan, dan rumitnya surat izin masuk wilayah menambah panjang daftar kendala pelesir. Namun, seiring menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah mulai melonggarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Gairah untuk berberwisata pun kembali meningkat.

Pandemi Covid-19 membuat wisatawan gigit jari sepanjang tahun lalu, bahkan hingga saat ini. Kekhawatiran tertular, pembatasan perjalanan, dan rumitnya surat izin masuk wilayah menambah panjang daftar kendala pelesir. Namun, seiring menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah mulai melonggarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Gairah untuk berberwisata pun kembali meningkat.

Survei GoLocal Domestic Travel untuk platform perjalanan digital Agoda telah merilis informasi daerah favorit yang akan dikunjungi pasca pandemi Covid-19. Menurut survey, Bali masih menjadi daerah tujuan wisata populer. Selain keindahan alam yang mengagumkan, budaya yang masih kental, serta masyarakat yang ramah, Bali juga mempunyai kuliner yang kaya ragam dan rasa. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas masakan ikan laut di Bali bagian timur, tepatnya di Warung Lesehan Merta Sari yang terletak di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Setiap kali berkunjung ke Bali bagian timur, saya merasa belum lengkap tanpa singgah ke Warung Makan Merta Sari di Desa Pesinggahan. Walaupun tempatnya sederhana, bagi saya belum ada yang bisa menandingi kenikmatan bersantap ikan laut segar di sini. Bukan hanya saya yang merasakan itu. Setiap kali saya mampir, warung di dekat perbatasan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem ini selalu penuh dengan pengunjung.

Lesehan berkapasitas 120 orang yang dikelola keluarga Ni Komang Yunianti ini awalnya dirintis oleh mendiang I Nengah Sada pada 1980. Menu andalannya berbahan dasar tuna segar. Pelanggan akan disajikan menu utama berupa sepiring nasi putih hangat, sate lilit, sate tusuk, pepes, sup kuah ikan, *jukut* (sayur) urap kacang panjang, kacang tanah goreng nan renyah, serta sambal matah khas Bali yang menggoda selera.

Salah satu menu favorit saya di sini adalah

sate lilit. Sate lilit ala Lesehan Merta Sari menggabungkan bumbu-bumbu tradisional Bali yang dikenal dengan sebutan *basa genep*. Cabai, bawang merah, bawang putih, serai, merica, gula, serta garam dicampur kelapa parut dan ikan tuna yang dihaluskan. Cita rasa pedas manis dan aneka bumbu rempah membuat sate lilit khas Bali ini mudah diterima lidah masyarakat, bahkan turis asing. Menu lain yang tak kalah enak adalah sate tusuk yang terbuat dari potongan tuna berbentuk kotak dengan diberi sedikit kecap manis. Rasanya lezat sekali. Dagingnya lembut di mulut, terasa gurih, dan cukup *spicy*. Begitu pula pepes ikannya, terasa gurih di lidah.

Menu lain yang banyak diminati adalah sup kuah ikan. Baunya tidak amis, segar, dengan bumbu rempah-rempah yang terasa kuat di lidah. Semua masakan di sini memang istimewa. Walau hanya *jukut* urap kacang panjang, tetapi rasanya tak perlu diragukan. Nikmat sekali. Ditambah dengan kacang tanah goreng nan kriuk dan sambal matah yang pedasnya juara. Empat kata untuk ini semua: *pokokne, jeg jaenn sajan* ....

Banyak orang takut makan sate karena umumnya terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam. Sate lilit dan sate tusuk khas Pesinggahan berbeda karena berbahan dasar ikan tuna segar sehingga rendah kolesterol, lebih lezat, lebih sehat, dan tentunya halal. Meski lokasinya sedikit jauh dari jalan lintas utama, Lesehan Merta Sari tak pernah absen diserbu pengunjung, apalagi sebelum terjadi wabah corona.

Mereka yang ingin lebih santai bisa memilih tempat duduk lesehan. Bagi yang tidak mendapatkan lapak lesehan, di bagian belakang tersedia tempat duduk berupa kursi dan meja. Soal harga, warung yang rata-rata setiap hari menghabiskan 100 kilogram (kg) ikan tuna, bahkan sampai 200 kg saat akhir pekan atau libur nasional ini hanya mematok Rp38.000 untuk satu porsi. Sangat murah jika dibandingkan rasa puas setelah bersantap di sini.

Cukup mudah untuk menemukannya. Cukup membuka aplikasi Google Maps di smartphone lalu mengetik "merta sari restaurant pesinggahan", Anda akan langsung diarahkan pada warung yang cukup legendaris ini. Salah satu kelebihan liburan di Bali adalah kemudahan infrastruktur yang disediakan pemerintah. Menyewa kendaraan juga mudah dilakukan di Bali, selain layanan angkutan yang bisa dipesan secara daring seperti grab atau gojek.

Misalnya, Anda menginap di Sanur, perjalanan yang diperlukan menuju warung ini kurang lebih tiga puluh kilometer dan cukup ditempuh selama empat puluh menit dengan kendaraan, baik mobil ataupun motor. Dari Jalan Bypass Ngurah Rai—Sanur, Anda akan dituntun oleh Google Map menyusuri Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Di sepanjang jalan terdapat beberapa objek wisata seperti Keramas Aero Park, Bali Safari & Marine Park, Pantai Purnama, dan objek wisata lainnya. Kira-kira 500 meter setelah ujung Bypass Ida Bagus Mantra, Anda akan menjumpai pertigaan, kemudian belok kiri di jalan Kresna dan Anda akan tiba di Warung Lesehan Merta Sari.

Bagaimana, cukup menarik, bukan? Sobat e-migazine yang tertarik bisa datang langsung. Warung yang sering disinggahi pejabat dan artis ini buka setiap hari dari pukul delapan pagi hingga pukul enam sore, kecuali hari raya Nyepi. Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri pernah singgah lebih dari sekali ke Lesehan Merta Sari. Mantan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, juga Susi Pudjiastuti juga tak ketinggalan pernah merasakan lezatnya olahan ikan di sini. Banyak juga politikus dan artis yang berdatangan setelahnya, seperti Tamara Bleszynski hingga Nikita Willy. Foto kunjungan mereka terpampang di beberapa sudut warung ini.

Penulis: Pandu Widiyatmika
Editor: Tobagus Manshor Makmun

Sumber: Instagram/ernestprakasa

Imperfect,
Sebuah Perjalanan untuk Menerima Diri Sendiri

Imperfect bercerita tentang Rara (Jessica Milla), perempuan yang tak peduli dengan ejekan orang tentang bentuk tubuhnya. Tokoh utama ini terlahir dari seorang ibu yang merupakan model sukses di era 90-an bernama Debby (Karina Suwandi). Sejak kecil, ia kenyang dengan tekanan *bully*, *body shaming*, dan *beauty standard* hingga semua itu tak mampu lagi menyakitinya.

Rara adalah seorang dengan kepribadian baik. Ia kerap membantu mengajar pada sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak jalanan. Sifat baik tersebut membuat sang kekasih,

Dika (Reza Rahadian) sangat menyayanginya. Bagi Dika, Rara adalah wanita sempurna karena memiliki hati yang baik dan lembut.

Selain baik hati, Rara juga merupakan sosok cerdas dan setia kawan. Hal itu yang membuatnya bersahabat baik dengan Fey, rekan kerja Rara di Malathi, sebuah perusahaan besar produsen produk-produk kecantikan. Namun, keadaan berubah saat ia berusaha meningkatkan karir.

Rara berhasil mendapatkan kesempatan menjadi manajer di perusahaan Malathi. Ia pun mengubah penampilannya seperti standard yang diinginkan sebuah perusahaan kecantikan. Sayangnya, bukan hanya penampilan Rara saja yang berubah, tetapi juga sikapnya terhadap Fey sahabatnya sendiri dan juga kekasihnya, Dika.

Film yang disutradarai Ernest Prakasa ini merupakan adaptasi buku karya istrinya, Meira Anastasia, berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance. Sebelum menjadi buku, materi-materinya berasal dari unggahan Meira di instagram. Secara garis besar, buku tersebut bercerita tentang penerimaan diri terhadap hal yang dipunyai, misalnya terkait bentuk badan dan sebagainya.

Film ini melibatkan pemeran dengan jumlah cukup banyak bila dibandingkan keempat film garapan Ernest sebelumnya. Sebanyak 40 orang tergabung dalam tim produksi film. Totalitas Jessica Milla sebagai pemeran utama pun patut diacungi jempol. Untuk menyesuaikan karakter yang diperankan, ia menaikkan berat badan sebanyak sepuluh kilogram dalam jangka waktu sebulan. Tidak hanya itu, ia juga harus menguruskan badan sesuai skenario film.

Memang masih ada beberapa hal yang bisa dikritisi, misalnya pada beberapa dialog, nada dan jedanya seperti dihitung sehingga tidak terlihat natural. Seolah-olah ia hanya menunggu giliran mengucapkan dialog. Saat lawan telah selesai bicara, ia langsung mengucapkan sesuai skrip. Dialog yang hanya karena diwajibkan oleh naskah dan bukan karena buah dari pikiran dan perasaan yang mendengarkan lawan main.

Secara keseluruhan, Ernest Prakasa berhasil mengubah isu sensitif menjadi film yang ringan namun bermakna. Diselingi komedi yang mudah dipahami, film ini mengajarkan penontonnya untuk selalu bersyukur terhadap penampilan yang diberikan Tuhan.

Tidak perlu berusaha keras untuk mengubah diri agar disukai orang lain karena yang terpenting dalam hidup adalah menjadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Pun kecantikan wanita seharusnya tidak hanya diukur dengan fisik semata. Timbangan hanya menunjukkan angka, bukan nilai. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa hidup bahagia.

Mengusung tema *insecurity* pada bentuk fisik, film ini bisa membuat Anda belajar menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Bagi yang belum menonton, saya pikir, "*Imperfect*" layak masuk ke dalam *playlist*.

Penulis: Mohamad Azhari
Editor: Tobagus Manshor

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200
Email : kpp.081@pajak.go.id
Website : www.https:pajak.go.id
www.https://pipamigas.net/migazine/